

# **FINANCIAL RESOURCES SEBAGAI FAKTOR PENENTU DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**Lantip Diat Prasojo**

*Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*

## **Abstract**

*The issue of financial resources as strategic factor in the implementation of educational policies usually led to the provision of funds or education budgets which are generally required in the large nominal amount. In the context of the scientific implementation and financial resources not only leads to provision of funds or the budget, but includes other factors, such as Human Resources (HR), facilities, and others. Financial resources which are consist of resources, human resources and stakeholders are the three factors that very important and directly related to the implementation of education policy. Implementation of education policy is one of public policy so that stakeholders should become a part of the study in its policy analysis.*

**Key words:** *financial resources*

## **PENDAHULUAN**

Masalah pendidikan adalah suatu gejala universal yang melanda setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Perbedaannya hanya terletak pada corak strategi dalam solusi pemecahan yang terbaik, yang sampai saat ini masih merupakan dilema. Begitu juga dengan masalah pendidikan di Indonesia, pada satu sisi tuntutan pemerataan sesuai dengan pasal 31 UUD'45 mesti diwujudkan, dan pada sisi lain mutu pendidikan sebagai upaya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitaspun merupakan tuntutan yang harus seiring dengan laju pembangunan bangsa.

Disamping itu, kebijakan UUSPN NO. 2 Tahun 1989 tentang penyelenggaraan pendidikan yang diatur melalui Sistem Pendidikan Nasional, yang secara nyata melibatkan berbagai komponen pendidikan seperti; penyediaan sarana dan pra-sarana baik fisik maupun non-fisik, sampai saat ini juga masih merupakan masalah yang memerlukan cara pengaturan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.

Semua permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, jika ditelaah secara mendalam akhirnya akan mengarah pada satu bagian yang mendasar, yaitu penyediaan dana atau anggaran pendidikan yang umumnya diperlukan dalam jumlah nominal yang cukup besar. Kenaikan anggaran pendidikan secara bertahap naik 2,7 persen per tahun hingga tahun 2009, dengan rincian kenaikan 6,6% (2004), 9,29% (2005), 12,01% (2006), 14,68% (2007), 17,40% (2008), dan 20,10 % (2009). Sedangkan untuk tahun 2005 anggaran yang dialokasikan sebesar 8,1% dan 9,1% pada tahun 2006. Dari ungkapan ini menunjukkan adanya kontribusi pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengacu pada konsep efektivitas dan efisiensi, tentunya secara operasional pengalokasian biaya pendidikan memerlukan perhatian tersendiri karena sektor pendidikan merupakan sektor pelayanan public yang tidak mudah disejajarkan dengan bentuk perusahaan yang bernafaskan ekonomi atau kegiatan untung rugi, pelayanan pendidikan lebih mengarah pada kepentingan politik yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Besarnya anggaran biaya pendidikan dan makin berkembangnya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap sektor pendidikan adalah konsekuensi politis dimana profesionalisme pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah semakin diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yang pada operasionalnya memiliki perbedaan pengertian untuk setiap periode/tahap pembangunan. Ace Suryadi mengatakan bahwa, ***“Pendekatan dalam membangun Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka memasuki masa tinggal landas (1993-2018) pada hakekatnya berbeda dengan membangun sistem pendidikan dalam masa persiapan tinggal landas (1969-1993).”*** (Mimbar Pendidikan, NO. 2 Tahun IX Juli 1990, University Press IKIP Bandung)

Dengan demikian jelaslah bahwa, besarnya anggaran biaya pendidikan yang dibutuhkan merupakan implikasi dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sebagai akibat kemajuan pembangunan, atau dengan kata lain hubungan biaya pendidikan akan berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang diperlukan masyarakat. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan memerlukan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal itu, sumber-sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah “bagaimana *financial resources* dapat menentukan implementasi kebijakan pendidikan?”

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori *Financial Resources***

Penentuan *setting priority financial resources* dalam implementasi kebijakan pendidikan diperlukan landasan filosofi yang kokoh. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fakry Gaffar (1991) yang mengatakan bahwa:

*Kalau dasar filosofisnya mementingkan equal educational opportunity, maka implikasi terhadap dananya adalah pada pendidikan dasar. Tetapi apabila pendidikan ditekankan pada educational quality dan relevansi, maka yang dipentingkan adalah program pendidikan vokasional dan teknologi. Ini yang dimaksud Philosophical Foundation dalam menentukan priority setting.*

Ragamnya kondisi dan karakteristik daerah di suatu negara akan mengakibatkan berbedanya sistem pembiayaan yang dikembangkan oleh suatu negara. Keragaman ini ditujukan untuk memberikan keadilan dan pendidikan yang bermutu sesuai dengan konteks dan kemampuan daerah dan negara. Thomas, H. J. (1985) mengungkapkan tentang prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang diberlakukan pemerintah di USA saat ini antara lain:

- a. *Flat Grant*, model ini mendistribusikan dana-dana negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak lokal atau pembagian sama rata.

- b. *Full State Funding*, model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara yaitu menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.
- c. *The Foundation Plan*, model ini ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap distrik sekolah lokal di negara bagian.
- d. *Guaranteed Tax Base*, model ini merupakan matching plan, dimana negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah.
- e. *Percentage Equalizing*, model ini merupakan bentuk dari *Guaranteed Tax Base* dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel.
- f. *Power Equalizing*, model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian.

Komponen-komponen pembiayaan pendidikan bersumber pada dana pemerintah, orangtua siswa, dan masyarakat. Dalam rencana belanja secara garis besar dibagi ke dalam komponen gaji dan non gaji. Sedangkan komponen non gaji meliputi: sub komponen pengadaan alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana tingkat, sarana sekolah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah. Komponen biaya non gaji yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi: pembelian buku, alat tulis, tas, sepatu, pakaian seragam, biaya kursus, karyawisata, sumbangan insidental, dan uang jajan yang langsung dikeluarkan oleh orangtua siswa tanpa melalui sekolah, serta biaya pembangunan fisik, perlengkapan alat belajar, beasiswa, dan lainnya yang tidak tercatat dalam RAPBS. Komponen pembiayaan meliputi (1) biaya operasional lancar personel yang terdiri dari kesejahteraan dan pengembangan, (2) biaya bukan personel, (3) biaya investasi/modal, (4) biaya penunjang yang terdiri dari biaya kebutuhan siswa/orang tua siswa dan biaya pengawasan serta pembinaan.

Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi *cost-effectiveness* dan *cost benefit*. *Cost effectiveness* dikaitkan dengan perbandingan biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar. Efisiensi internal atau *cost effectiveness* sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu: (1) Faktor institusional, (2) Faktor manajerial. Sedangkan *cost benefit* dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. Terdapat dua hal penting dalam hal investasi tersebut, yaitu: (1) Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar intrinsiknya; (2) Nilai guna dari kemampuan.

Cohn dan Geske (1990:71) mengelompokkan biaya pendidikan sebagai, (1) biaya langsung (*direct cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga siswa, (2) biaya tidak langsung (*indirect cost*) seperti *forgone earning*. Pengertian lain biaya pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). (Cohn, 1979; Jones, 1985; Thomas, 1976). Selain itu, Hallak (1999:25-27) mengelompokkan biaya berdasarkan, (1) jenis pendidikan (umum dan swasta), dalam hal ini pengeluaran

dibandingkan dengan jumlah pendaftaran, (2) tingkat pendidikan dan jurusan, (3) tujuan yaitu biaya langsung (pengeluaran berulang untuk gaji dan bahan) dan biaya tak langsung (untuk manajemen umum) serta biaya untuk menganjurkan kehadiran di sekolah (biaya intervensi; menjelaskan perbedaan antara biaya rata-rata antar negara/tingkat pendidikan), biaya sosial serta biaya pemindahan atau *transfer cost* (kantin, asrama, transpor dan beasiswa), dan (4) sifat pengeluaran (penggajian).

## **2. Teori Kebijakan Pendidikan**

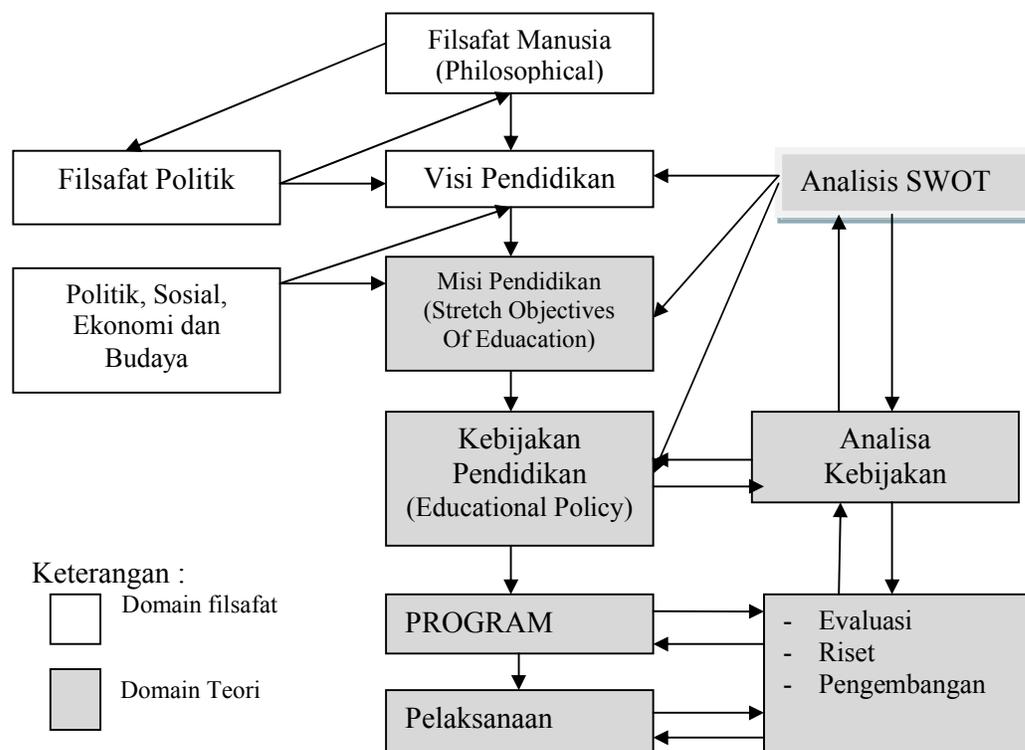
Menurut Gaffar (2007), Kebijakan pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Hal ini sesuai pandangan Good (Imron, 1996) yang menyatakan bahwa:

*Education policy is judgement, derived froms one system of values and some system assesment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.*

Tilaar (2008:139), mendefinisikan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Dalam penyusunan kebijakan pendidikan ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofi dan teori pendidikan. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan dinyatakan dalam program pendidikan yang dipandang memiliki dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program pendidikan ini perlu dilakukan evaluasi, riset dan pengembangan sebagai masukan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Model kebijakan pendidikan yang memperhatikan domain filsafat pendidikan dan domain teori pendidikan (Tilaar :2008:176) sebagai berikut:

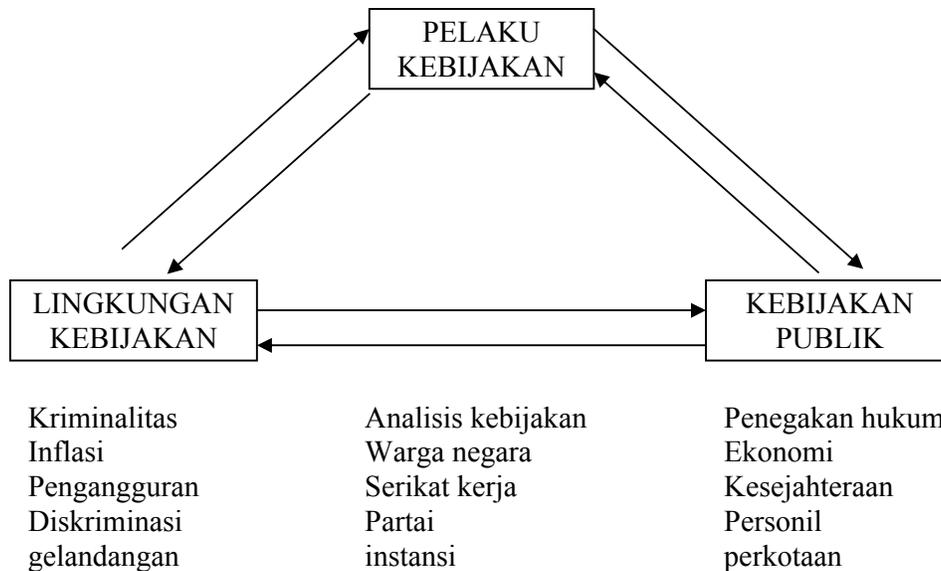


Gambar 1. Model Kebijakan Pendidikan dengan Domain Filsafat Pendidikan

Upaya memperhatikan kebutuhan pendidikan merupakan wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan akan meningkatkan mutu SDM dalam bentuk penguasaan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan pengembangan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dan sosial. Berdasarkan uraian diatas maka definisi kebijakan publik yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini adalah sintesis nilai-nilai eklektik dari berbagai pendapat ahli tersebut, yaitu serangkaian keputusan-keputusan yang memberikan koridor bertindak dan atau menetapkan keputusan-keputusan berikutnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari berbagai konsep dan pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan (Dunn, 2004). Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.



Gambar 2. Tiga Elemen Sistem Kebijakan

Sumber: Diadaptasi dari Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*. 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, 1978)

Model kebijakan (*Policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan harus ada karena sangat bermanfaat. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan cara mengurangi kompleksitas masalah untuk dapat dikelola oleh para analis.

Proses analisis kebijakan menurut Carl V. Patton & David S. Sawicki (1986:25) terdiri dari enam langkah berikut:

**Langkah Pertama: Verifikasi, Perumusan dan Perincian Masalah.** Perumusan masalah dianggap sebagai hal yang sulit karena ketidakjelasan tujuan yang ditetapkan rekanan atau tujuan yang ditetapkan dalam keadaan konflik. Kemungkinan lain terdapat perbedaan pendapat antara rekanan dengan analis dalam proses penetapan. Dalam melakukan proses analisis kebijakan, analis memerlukan sejumlah informasi yang dikumpulkan dari data-data yang tersedia.

**Langkah Kedua: Menetapkan Kriteria Evaluasi.** Untuk melakukan perbandingan, pengukuran dan pemilihan alternatif yang harus diputuskan diperlukan kriteria evaluasi yang sesuai. Secara umum dipakai pengukuran atas biaya, keuntungan, efektivitas, efisiensi, keadilan, legalitas dan akseptabilitas secara politis.

**Langkah Ketiga: Identifikasi Alternatif Kebijakan.** Mengurutkan sejumlah alternatif yang cocok dengan rumusan permasalahan. Hal ini juga berkaitan dengan keragaman dan berbagai kemungkinan dari alternatif yang dipertimbangkan.

**Langkah Keempat: Evaluasi Kebijakan Alternatif.** Kegiatan untuk menilai kebijakan yang ditetapkan dengan berpedoman pada kriteria-kriteria evaluasi yang ditetapkan.

**Langkah Kelima: Memilih Kebijakan Alternatif.** Penyajian suatu hasil akhir pemilihan atas alternatif-alternatif dengan urutan kriteria dari setiap alternatif terpilih.

**Langkah Keenam: Monitoring Dampak Kebijakan.** Melihat dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh dari kebijakan yang ditetapkan yang kemudian diperlihatkan secara utuh.

## **PEMBAHASAN**

Prosedur pemecahan masalah adalah dengan memahami secara konsep dan teori yang terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan dan *financial resources*. Menganalisis mekanisme dan kaitan *financial resources* dalam menentukan implementasi kebijakan pendidikan.

### **1. Analisis *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Analisis *financial resources* sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan dilakukan berdasarkan teori Carl V. Patton & David S. Sawicki (1986:25) terdiri dari enam langkah. Analisis ini dimulai dari **verifikasi, perumusan dan perincian masalah *financial resources* sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan.** Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang memprosoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembautan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru sebelum implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan. Masalah sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pendidikan meliputi (1) dana pemerintah, orang tua dan masyarakat, (2) SDM seperti guru, siswa, komite, dan lain-lain, (3) sarana dan prasarana sekolah, (4) *stakeholders*.

### **2. Kriteria Evaluasi *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.**

Patton & Sawicki (1986:25) mengatakan bahwa penetapan kriteria evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perbandingan, pengukuran dan pemilihan alternatif yang harus diputuskan diperlukan kriteria evaluasi yang sesuai. Secara umum dipakai pengukuran atas biaya, keuntungan, efektivitas, efisiensi, keadilan, legalitas dan akseptabilitas secara politis. Dalam pembahasan sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pendidikan, maka ditetapkan evaluasi yang terkait dengan dana pemerintah, orang tua dan masyarakat, (2) sumberdaya manusia (SDM) seperti pimpinan, guru, siswa, komite, dan lain-lain, (3) sarana dan prasarana pendidikan, (4) *stakeholders*.

### **3. Identifikasi Alternatif *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.**

Dalam tahapan ini dilakukan proses pengurutan sejumlah alternatif yang cocok dengan rumusan permasalahan. Hal ini juga berkaitan dengan keragaman dan berbagai kemungkinan dari alternatif yang dipertimbangkan. Dalam kajian ini alternatif yang perlu dipertimbang adalah besarnya dana yang ada baik dari pemerintah, orang tua dan masyarakat terkait imlementasi kebijakan pendidikan karena tanpa dana implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kebutuhan guru, siswa dan *stakeholders* harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga harus menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan pendidikan.

#### **4. Evaluasi Alternatif *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.**

Berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi yang di atas, maka evaluasi *financial resources* sebagai faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan difokuskan pada faktor yang terkait dengan sumber dana, SDM dan *stakeholders*. Sumber dana, kompetensi SDM dan *stakeholders* merupakan tiga faktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan sebab tanpa ketiga faktor tersebut implementasi kebijakan pendidikan tidak jalan dengan lancar.

#### **5. Memilih Alternatif *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.**

Alternatif *financial resources* sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan faktor sumber dana, SDM dan *stakeholders*. Implementasi kebijakan pendidikan setidaknya akan tetap berjalan jika ada ketiga faktor tersebut, meskipun untuk sempurna juga perlu faktor sarana dan prasarana pendidikan.

#### **6. Monitoring dampak *Financial Resources* sebagai Faktor Penentu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.**

Dampak yang dimaksud dalam kajian ini adalah dampak yang timbul jika dalam implementasi kebijakan pendidikan tidak mempertimbangkan faktor sumber dana, SDM dan *stakeholders*. Dampak jika ketiga faktor tersebut tidak diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah implementasinya tidak jalan. Dampak lain jika salah satu faktor: *stakeholders* yang diperhatikan, maka implementasi kebijakan pendidikan masih berjalan namun tidak berjalan dengan lancar. Akan tetapi, jika faktor sumber dana dan SDM atau salah satunya yang tidak diperhatikan, maka kebijakan pendidikan tidak akan berjalan sama sekali.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan isu strategis, konsep dasar dan kajian kritis analisis *financial resources* sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber dana, SDM dan *stakeholders* merupakan tiga faktor yang sangat penting dan terkait langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu dari kebijakan publik sehingga *stakeholders* juga harus diperhatikan, selain faktor utama, yaitu: sumber dana dan SDM.

#### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal bahwa implementasi kebijakan pendidikan selain harus memperhatikan faktor sumber dana, SDM dan *stakeholders*, juga harus memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan agar implementasinya lebih sempurna dan tepat sasaran. Sarana dan prasarana menjadi salah satu unsur yang penting dalam implementasi kebijakan pendidikan sebab sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan memudahkan implementasi suatu kebijakan pendidikan.

## REFERENSI

- Ace Suryadi, *Mutu pendidikan Persekolahan Dan Perspektif*, Mimbar Pendidikan, NO. 2 Tahun IX Juli 1990, University Press IKIP Bandung.
- Clark, David; Hough, James, Pongtuluran, Aris; Sembiring, Robert; Triaswati, Ninasapti. (1997) *Indonesia: Education Financing Study*, Research Team: A Joint Publication of Asian Development Bank & Comparative Education. Research Centre The University of Hongkong.
- Cohn, Elchanan. (1979). *The Economic of Education (Revise edition)*. Cambridge – Massachusetts : Ballinger Publishing Company.
- Dunn, W. (2004). *Public Policy Analysis an introduction (3<sup>rd</sup> ed)*. Cambridge –Massachusetts : Pearson-Prentice Hall.
- Gaffar, M.Fakry. (1991), *Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan*, Bandung, Mimbar Pendidikan IKIP Bandung
- Gaffar, M. Fakry. (2000) *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dan Kebijakan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: IKIP Bandung.
- Goertz, Margaret E., Odden, Allan. (1999) *School-Based Financing*. California, Thousand Oaks: Corwin Press, Inc. A Sage Publication Company.
- Hallak, J. (1985) *Analisis Biaya & Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Penerjemah, Harso. Bharata Karya Aksara, Jakarta dan Unesco, Paris.
- Jones, Thomas H., (1985) *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*”, Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Co.
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/klip/detailklip.asp?klipID=N118091002>
- <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/11/pendidikan-dan-instrumen-hukum.html>.
- Patton, C.V & Sawicki, D.S. (1986). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Perntice-Hall, Englewood Cliff.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

o000o